

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Sri Sultan Hamengku Buwono X adalah Raja sekaligus Gubernur di Yogyakarta, beliau lahir dengan nama Bendoro Raden Mas Herjuno Darpito pada tanggal 2 April 1946. Setelah dewasa beliau bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Mangkubumi dan setelah diangkat sebagai putra mahkota diberi gelar KGPAH Hamengku Negara Sudibyo Raja Putra Nalendra Mataram. Lulusan Fakultas Hukum UGM ini dinobatkan sebagai raja di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dengan gelar Sri Sultan Hamengku Buwono X pada tanggal 7 Maret 1989 (Selasa Wage 19 Rajab 1421) menggantikan ayahnya, Sri Sultan HB IX yang meninggal di Amerika, Oktober 1988. Kemudian menjabat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, sejak 3 Oktober 1998.<sup>1</sup>

Pada hari Sabtu tanggal 7 April 2007 Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan dengan tulus ikhlas tidak bersedia lagi menjabat sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta setelah masa jabatannya yang sekarang berakhir pada 2008 nanti. Pernyataan Sri Sultan HB X tersebut disampaikan pada orasi budaya dan politiknya dalam acara “Malam Bakti Ibu Pertiwi” yang bertepatan dengan perayaan ulang tahun Sri Sultan HB X ke 61 di Pagelaran Kraton. Keputusan Sultan tersebut telah dipertimbangkan secara mendalam dengan laku spiritual-kultural yang biasa dilakukan oleh Raja Jogja. Pernyataan tersebut akhirnya menimbulkan beragam reaksi di masyarakat Yogyakarta, mulai dari kalangan politis, akademisi, pejabat hingga kerabat keraton.

---

<sup>1</sup> <http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/s/sri-sultan-hb-x/index.shtml>, 24 Mei 2007  
12:24:45 PM

Sejak beredarnya berita pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X yang tidak bersedia menjabat kembali sebagai Gubernur Propinsi DIY melalui media massa lokal di Yogyakarta, berbagai opini publik mengemuka sebagai respon terhadap pernyataan Sultan tersebut. Ada yang menganggapnya main-main, ada yang menganggapnya serius. Bahkan, seakan tidak percaya dengan pernyataan Sultan tersebut para pamong desa yang tergabung dalam Apdesi (asosiasi pemerintahan desa seluruh Indonesia) Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 18 April mengadakan acara *Pisowanan Ageng*, yaitu sebuah acara yang tujuannya meminta penjelasan langsung dari Sri Sultan HB X, dan juga bentuk dukungan agar Sultan tetap menjabat sebagai Gubernur. Acara yang dimotori oleh para kepala desa dan sekretaris desa se-DIY itu mengerakkan ribuan masyarakat berbondong-bondong ke Keraton Yogyakarta, namun hasil dari *Pisowanan Ageng* itu adalah Sri Sultan HB X tetap memegang teguh pernyataannya tidak bersedia menjabat gubernur lagi, dan masyarakat diminta ikhlas menerima keputusan Sultan tersebut.

Secara umum, opini publik terbagi kedalam dua kelompok. *Pertama*, reaksi yang tidak puas. Mereka ini yang merasa kecewa bila Sultan HB X mundur dari jabatan sebagai gubernur, dan masih menginginkan Sultan HB X sebagai gubernur pada 2008 nanti. *Kedua*, reaksi yang memandang pernyataan Sultan HB X itu sudah benar, mereka menilai keputusan itu merupakan langkah bijak Sultan HB X dalam membuka kran demokratisasi di Yogyakarta. Dengan kata lain, mereka mendukung Sri Sultan HB X mundur dari jabatan gubernur

Berkaitan dengan hal tersebut sangat menarik ketika melihat berita-berita yang ditulis dalam surat kabar lokal di Yogyakarta pada bulan April 2007, diantaranya adalah *Radar Jogja*, *Kedaulatan Rakyat*, dan *Bernas Jogja*. Hal ini sangat menarik karena dari berbagai ulasan media massa lokal pernyataan Sultan tersebut dikaitkan dengan RUU Keistimewaan DIY yang di dalamnya berisi masalah kepemimpinan Sri Sultan dalam kedudukannya sebagai Sultan Kraton Yogyakarta Hadiningrat maupun sebagai Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, disamping itu pula kepemimpinan Sri Paku Alam sebagai Adipati Pakualaman dan kedudukannya sebagai Wakil Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Perdebatan ini sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Namun kemudian mengemuka kembali dan hangat dibahas di media massa lokal.

Melihat maraknya pemberitaan pernyataan Sultan HB X yang tidak bersedia menjabat gubernur lagi diberbagai media cetak pada April 2007, memberikan gagasan yang melatar belakangi penelitian ini. Sekilas, Kalau kita perhatikan, Ketiga media massa ini (*Kedaulatan Rakyat*, *Radar Jogja*, dan *Bernas Jogja*) tampak telah menghadirkan wacana yang seimbang tentang kasus pernyataan Sultan HB X dengan mengacu pada prinsip *cover both side*. Media tersebut sekilas telah menghadirkan diskusi dimana semua pihak yang berkepentingan dengan kasus pernyataan Sultan HB X dilibatkan. Masing-masing pihak menampilkan klaim dan kesimpulan masing-masing tentang masalah pernyataan Sultan HB X sehingga perdebatan berlangsung secara dinamis dan konfrontatif.

Media, sebagaimana *Kedaulatan Rakyat*, *Radar Jogja* dan *Bernas Jogja*, berpotensi untuk mengobarkan sekaligus meredam konflik. Untuk itu, standar jurnalisme dengan asas *cover both side* menjadi amat penting agar gambaran realitas yang ada dibenak khalayak tidak bias. Namun setelah peneliti membaca ketiga surat kabar ini, ada bingkai yang berbeda antara *Kedaulatan Rakyat*, *Radar Jogja*, dan *Bernas Jogja* dalam memahami dan mengkonstruksi pernyataan Sri Sultan HB X, yaitu adanya suatu upaya pengkonstruksian terhadap realitas sosial yang diliput surat kabar tersebut dengan cara penonjolan atau penekanan terhadap suatu aspek-aspek tertentu dari suatu realitas atau isu tersebut. Kebenaran menjadi sangat penting karena media mempunyai tanggung jawab moral terhadap kebenaran informasi.

Sangat menarik untuk membahas bagaimana ketiga media massa ini menyeleksi, mengolah, dan memberitakan pernyataan Sri Sultan HB X tersebut. Peristiwanya sama, tetapi konstruksinya berbeda. Contohnya dalam pemberitaan yang dilakukan oleh harian *Kedaulatan Rakyat*, terbitan tanggal 9 April 2007 yang menyuguhkan sebuah *headline*: "*Pernyataan Sultan HB X Kejutkan Banyak Pihak, Suksesi Butuh Kepastian Hukum*". Dalam kasus pernyataan Sri Sultan *Kedaulatan Rakyat* mengkonstruksinya sebagai masalah politik. Keputusan Sri Sultan HB X untuk tidak menjabat sebagai gubernur lagi akan menimbulkan dampak cukup besar bagi perkembangan politik lokal. Pasalnya pemilihan kepala daerah (pilkada) DIY akan dilakukan secara langsung seperti daerah-daerah lain. Pendeknya, kasus ini banyak sekali unsur politiknya yang layak diperdebatkan.

Berbeda lagi dengan yang diberitakan oleh harian *Radar Jogja*, terbitan 9 April 2007 dalam berita yang berjudul “*Rakyat Jangan Paksa Sultan*” dengan anak judul (*kicker*) “*Ikuti Jejak Ayahnya, Bukti HB X Negarawan*”, dalam pemberitaannya harian *Radar Jogja* mengidentifikasi kasus “pernyataan Sri Sultan HB X” sebagai masalah budaya. Semua masalah ditarik ke wilayah budaya. Budaya dalam artian jabatan Sultan sebagai pemimpin sebuah lembaga kebudayaan seperti Keraton. Dalam berita yang ditulis *Radar Jogja*, pernyataan Sri Sultan HB X yang diungkapkan dalam kapasitasnya sebagai raja trah Mataram “belum lengkap”, karena jika maklumat raja mestinya diucapkan di Bangsal Sitihiinggal dengan atribut lengkap berupa pakaian kebesaran sebagai Sultan.

Selanjutnya yaitu frame dari *Bernas Jogja* yang memaknai pernyataan Sri Sultan HB X itu sebagai masalah politik dan pernyataan sejarah. Pandangan *Bernas Jogja* ini dapat dilihat dari berita yang berjudul “*Terkait Pernyataan Sri Sultan HB X, Benarkah Hanya Sebuah Basa-Basi Politik ?*” yang dimuat tanggal 9 April 2007 yang memuat komentar dari Heru Wahyukismoyo sebanyak lima paragraf yang menilai pernyataan itu hanya sebagai ‘basa-basi politik’. Kedua, *Bernas Jogja* mengidentifikasi pernyataan Sultan ini sebagai Pernyataan Sejarah. Hal ini nampak dalam kutipan teks berita yang menganggap pernyataan itu bersejarah dan terdapat di seluruh edisi yang diteliti. Dalam hal ini, ada sejumlah nama yang menjadi “langganan” untuk diwawancarai media. Kepada mereka inilah pemberitaan media tentang kasus pernyataan Sultan terfokus, sehingga perspektif mereka pula yang dominan.

Adapun alasan pemilihan media surat kabar *Kedaulatan Rakyat*, *Radar Jogja*, dan *Bernas Jogja* karena *Pertama*, ketiga koran tersebut memiliki keunikan sosio-historis, dimana *Kedaulatan Rakyat* pernah berafiliasi dengan Deppen pada tahun 1966, sedangkan *Radar Jogja* merupakan produk dari harian *Jawa Pos* yang dimiliki Group Tempo sejak 1982, sedangkan *Bernas Jogja* pernah berafiliasi dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) pada 1985. *Kedua*, koran *Kedaulatan Rakyat* dan *Jawa Pos Radar Jogja* merupakan surat kabar harian dengan oplah terbesar di Indonesia, pada saat penelitian ini dilakukan<sup>2</sup>. *Ketiga*, pemilihan ketiga harian ini karena paling banyak memuat berita pernyataan Sri Sultan HB X yang tidak bersedia lagi menjabat gubernur (sejak 8 April 2007). *Keempat*, pemilihan ketiga surat kabar tersebut karena faktor kemudahan mendapatkannya.

## B. RUMUSAN MASALAH.

Untuk membuat suatu masalah yang diteliti menjadi jelas, diperlukan perumusan masalah. Dari latar belakang diatas, perumusan masalah yang diajukan sebagai fokus kegiatan penelitian ini adalah: Bagaimana harian *Kedaulatan Rakyat*, *Radar Jogja*, dan *Bernas Jogja* membingkai berita pernyataan Sri Sultan HB X yang tidak bersedia menjabat Gubernur lagi, edisi tanggal 9 sampai 12 April 2007 ?

<sup>2</sup> Lihat harian *Kedaulatan Rakyat*, Sabtu 14 Juli 2007, penelitian Nielsen Media Research terbaru menunjukkan bahwa harian *Kedaulatan Rakyat* menduduki peringkat ke 6 sebagai surat kabar dengan jumlah pembaca terbanyak. Sedang penelitian Nielsen Media Research pada tahun 2006 menunjukkan *Jawa Pos* menempati posisi pertama dalam pengumpulan jumlah pembaca pada segmen *All People*, yakni pembaca koran berusia 10 tahun keatas. Survei tersebut dilakukan di 12 pasar di Indonesia.

### C. TUJUAN PENELITIAN.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peristiwa dipahami oleh media, bagaimana peristiwa itu disajikan dan dibingkai oleh media *Kedaulatan Rakyat*, *Radar Jogja* dan *Bernas Jogja* dalam mengkonstruksi berita pernyataan Sri Sultan HB X yang tak bersedia jadi Gubernur lagi, edisi tanggal 9 sampai 12 April 2007.

### D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka manfaat penelitian yang sekiranya dapat diambil adalah:

#### 1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan, referensi, dan kajian bagi yang meminati studi analisis *framing*, dan kajian mengenai peran media lokal dalam hal mendorong demokrasi di tingkat lokal. analisis *framing* yaitu analisis yang memusatkan perhatian pada bagaimana media mengemas dan membingkai berita, dimana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus, dengan memberikan sorotan terhadap aspek-aspek tertentu saja.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat membantu bagi para pembaca karena dapat menambah wawasan, dan kesadaran para khalayak untuk lebih mengetahui bagaimana berita itu disajikan dan dapat memahami bagaimana cara media mengemasnya.

## **E. KERANGKA TEORI.**

Kerangka teori adalah kerangka yang terdiri dari teori-teori yang akan digunakan untuk menganalisis masalah yang diteliti. Kerangka teori yang digunakan meliputi beberapa acuan serta unsur yang menjadi pendukung dan penghubung sesuai dengan obyek yang sedang diteliti.

### **E.1 Komunikasi Sebagai Produksi Pesan dan Pertukaran Makna**

Analisis *framing* adalah salah satu metode analisis teks media yang termasuk kedalam paradigma konstruksionis. Paradigma ini memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, tetapi hasil dari konstruksi. Karenanya, perhatian analisis pada paradigma konstruksionis adalah menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi, dengan cara apa konstruksi itu dibentuk. Dalam studi komunikasi, paradigma konstruksionis ini seringkali disebut sebagai paradigma produksi pesan dan pertukaran makna<sup>3</sup>. Ia sering dilawankan dengan paradigma positivis (paradigma transmisi). Pandangan positivis melihat komunikasi sebagai bentuk 'pengiriman pesan' atau transmisi pesan. Proses komunikasi tersebut bersifat *linier*, karena melihat komunikasi mengalir dari komunikator ke komunikan, kemudian komunikator dilihat sebagai pihak yang aktif sedangkan komunikan sebagai pihak yang pasif. Dalam model ini, komunikasi transmisi menitik beratkan pada bukan bagaimana komunikan menerima pesan, akan tetapi sejauh

---

<sup>3</sup> John Fiske, "Introduction to Communication Studies" 2<sup>nd</sup> Edition, London and New York: Routledge, (1990), hlm 2-4



mana pesan yang dimaksudkan oleh komunikator sesuai dengan yang diterima oleh komunikan. Bagi kaum positivisionis, komunikasi hanyalah sebagai proses transmisi pesan atau berlangsungnya pesan dari pengirim (komunikator) hingga sampai kepada penerima (komunikan) melalui trasmmitter atau media. Media disini dilihat murni sebagai saluran, tempat bagaimana transaksi pesan, media dilihat sebagai sarana yang netral. Misalnya ketika komunikator ingin menyampaikan sebuah berita demonstrasi mahasiswa yang berakhir dengan kerusuhan kepada penerima (khalayak), maka apa yang tampil dalam pemberitaan itulah yang sebenarnya terjadi. Ia hanyalah saluran untuk menggambarkan realitas, menggambarkan peristiwa. Dalam mempelajari komunikasi sebagai transmisi pesan, yang menjadi perhatiannya adalah hal-hal seperti efisiensi dan akurasi. Komunikasi berfungsi sebagai suatu proses untuk mempengaruhi perilaku atau *state of mind* pribadi orang lain. Jika efek yang diberikan itu berbeda atau lebih kecil dari yang diharapkan, model ini cenderung berbicara tentang kegagalan komunikasi, dan ia akan melihat pada tahap-tahap dalam proses penyampaian untuk mengetahui dimana kesalahan tersebut terjadi.

Berbeda dengan pandangan positivis, pandangan konstruksionis melihat bahwa komunikasi adalah 'proses produksi dan pertukaran makna'. Titik fokus dari pandangan ini adalah bagaimana pesan diciptakan oleh komunikator dan

bagaimana pesan tersebut secara aktif ditafsirkan oleh individu penerima<sup>4</sup>. Analisis framing termasuk ke dalam paradigma konstruksionis. Ada dua karakteristik penting dari pendekatan konstruksionis.

*Pertama*, pendekatan konstruksionis menekankan pada politik pemaknaan dan proses bagaimana seseorang membuat gambaran tentang realitas. Makna bukanlah sesuatu yang absolut, konsep statik yang ditemukan dalam suatu pesan. Makna adalah suatu proses aktif yang ditafsirkan oleh seseorang dalam suatu pesan. *Kedua*, pendekatan konstruksionis memandang kegiatan komunikasi sebagai proses yang dinamis. Pendekatan ini memeriksa bagaimana pembentukan pesan dari sisi komunikator, dan dalam sisi penerima ia memeriksa bagaimana konstukri makna individu ketika menerima pesan<sup>5</sup>.

Paradigma konstruksionis mempunyai pandangan tersendiri terhadap berita, yang bersumber pada bagaimana wartawan dan media bersangkutan dalam keseluruhan proses produksi. Paradigma konstruksionis mempertanyakan posisi wartawan dan media massa dalam keseluruhan struktur sosial dan kekuatan sosial yang ada dalam masyarakat. Pada akhirnya posisi tersebut mempengaruhi berita, berita bukan lagi cermin dari realitas yang ada, tetapi sekumpulan realitas yang dipilih berdasarkan posisi wartawan dan media massa dalam kehidupan masyarakat. Dalam pengertian komunikasi sebagai produksi dan pertukaran makna ini, penyampaian pesan tidak hanya dipahami sebagai sebuah pesan yang disampaikan dari komunikator ke komunikan saja, tetapi pesan itu telah dipengaruhi oleh realitas yang berada diluar pesan itu. Pesan tidak dilihat secara paralel atau linear semata tetapi pesan itu sudah dinamis,

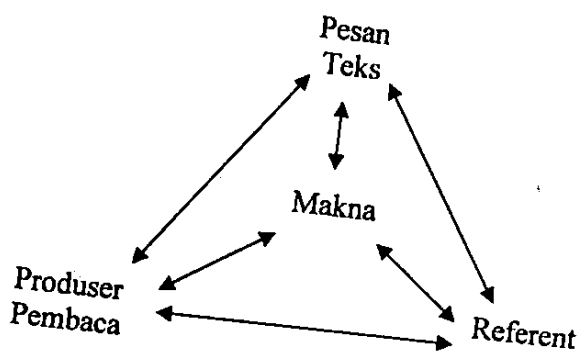
---

<sup>4</sup> Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, ideologi dan Politik Media*, LkiS, 2002, hlm 40.

<sup>5</sup> Ann N. Crigler "Introduction: Making Sense of Politics: Constructing Political Message and Meanings" dalam *Ibid*, hlm 40-41.

dimana ada pengaruh lain yang membuat pemahaman tentang pesan menjadi beragam. Sebuah teks berupa berita tidak bisa kita samakan seperti sebuah *copy* dari realitas, ia haruslah dipandang sebagai konstruksi atas realitas. Karenanya, sangat potensial terjadi peristiwa yang sama dikonstruksi secara berbeda.

Gambar 1  
Hubungan Proses Interaksi Pesan



Sumber: John Fiske, *Cultural and Communication Studies*, (1990: 11)

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan paradigma produksi pesan dan pertukaran makna yang disebut pendekatan konstruksionis dengan metode analisis framing sebagai pisau analisis. Analisis framing termasuk ke dalam paradigma konstruksionis. Paradigma ini mempunyai posisi dan pandangan tersendiri terhadap media dan teks berita yang dihasilkannya. Konsep mengenai konstruksionisme diperkenalkan oleh sosiolog interpretatif, Petre L. Berger, bersama Thomas Luckman<sup>6</sup>, melalui bukunya yang berjudul "*The Social Construction of Reality, a Treatise in the Sociological of Knowledge*" (1966)

<sup>6</sup> Eriyanto, *op. cit*, LKiS, (2002), hlm 13

Bagi kaum konstruksionis, realitas itu bersifat subyektif. Disini tidak ada realitas yang bersifat obyektif, karena realitas itu tercipta lewat konstruksi dan pandangan tertentu. Ia menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, yang mana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif.

### E.2 Cara Pandang Paradigma Konstruksionis Terhadap Media<sup>7</sup>

Pendekatan konstruksionis mempunyai penilaian sendiri bagaimana media, wartawan dan berita dilihat. Penilaian tersebut dapat dirangkum sebagai berikut: *Pertama*, Fakta/Realitas adalah hasil konstruksi. Didalam media massa sulit untuk menemukan obyektivitas dalam pemberitaan terhadap suatu fakta atau realitas. Realitas itu bersifat subyektif. Kerana fakta yang ditampikan dalam berita di media massa merupakan fakta yang dipilih oleh wartawan. Wartawan disini bukan hanya pelapor, karena disadari atau tidak ia menjadi partisipan dari keragaman penafsiran dan subyektivitas dalam publik. Realitas tersebut tercipta lewat konstruksi yang dibangun oleh wartawan dengan sudut pandang tertentu.

Konstruksionis	Fakta merupakan konstruksi dari realitas. Keberadaan suatu fakta bersifat relative, berlaku sesuai dengan konteks tertentu.
Positivis	Ada fakta yang "riil" yang diatur oleh kaidah-kaidah tertentu yang berlaku secara universal.

Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*

Menurut Laster Markel dari *The New York Times*, menegaskan bahwa sesungguhnya tidak ada laporan yang benar-benar "obyektif":

<sup>7</sup> Penulisan pada bagian ini bersumber dari buku Eriyanto, 2002, *Analisis Framing: Konstruksi, ideologi dan Politik Media*, Yogyakarta, LkiS. Dengan sedikit merangkai ulang hingga memiliki struktur yang baru.

“Seorang reporter yang paling obyektif sekalipun kalau mengumpulkan 50 fakta, mungkin hanya 12 fakta yang akan disampaikannya (ini antara lain karena keterbatasan kolom koran). Jadi, yang disisakan 38. ini penilaian nomor satu. Lalu sang editor akan meringkasnya lagi. Barangkali yang akan dimuat hanya satu fakta, dan 11 fakta lainnya disisihkan. Ini penilaian nomor dua. Lalu sang editor akan menentukan apakah berita itu ditempatkan dihalaman pertama atau terakhir, yang porsi perhatian-nya tentu berbeda. Ini penilaian nomor tiga. Semua penyajian fakta yang dikatakan obyektif itu ternyata melalui tiga kali penilaian, dan semuanya bergantung pada selera manusiawi dari orang yang melakukannya”<sup>8</sup>

*Kedua*, Media adalah agen konstruksi. Media merupakan sebuah sarana dimana pesan disebarkan dari komunikator ke penerima (khalayak). Namun demikian, media bukanlah sekedar saluran yang netral. Ia juga subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias dan pemihakannya. Media akan memilih realitas mana yang akan ia angkat menjadi berita dan mana yang tidak diambil. Dalam memberitakan sebuah fakta media melakukan konstruksi sebelum disampaikan ke khalayak.

Konstruksionis	Media sebagai agen konstruksi
Positivis	Media sebagai saluran pesan

Eriyanto, *Analisis Framing; Konstruksi, Ideology dan Politik Media*

*Ketiga*, Berita bersifat subyektif/konstruktif atas realitas. Pemaknaan seseorang tentang realitas bisa jadi berbeda dengan orang lain. Opini dari seorang wartawan dalam menulis sebuah berita tidak dapat dihilangkan, karena ketika meliput wartawan melihat dengan perspektif dan pertimbangan subyektif. Watawan tidak dapat menghindari subyektivitas, memilih fakta apa

<sup>8</sup> Laster Markel dalam William L. Rivers, *et.al, Mass Media and Modern Society 2<sup>nd</sup> Edition*, diterjemahkan oleh Haris Munandar & Dudy Priatma, *Media Massa & Masyarakat Modern*, Jakarta, Kencana, 2004, hlm 208

yang ingin dipilih dan membuang apa yang ingin ia buang. Jika ada wartawan yang mengkonstruksi realitas berbeda dengan realitas sebenarnya maka tidak dianggap sebagai kesalahan, tetapi memang seperti itulah pemaknaan mereka terhadap realitas, itulah praktek yang dijalankan oleh wartawan.

Konstruksionis	Berita bersifat subyektif: opini tidak dapat dihilangkan karena ketika meliput, wartawan melihat dengan perspektif dan pertimbangan subyektif
Positivis	Berita bersifat obyektif: menyingkirkan opini dan pandangan subyektif dari pembuat berita.

Eriyanto, *Analisis Framing; Konstruksi, Ideology dan Politik Media*

*Keempat*, Wartawan bukan pelapor, tetapi sebagai agen konstruksi realitas. Seorang wartawan seharusnya hanya bertugas untuk mentransfer sebuah berita mengenai apa yang dia lihat dan rasakan ketika sebuah peristiwa terjadi. Tetapi dalam pandangan konstruksionis tugas wartawan membentuk berita: ia menguraikan, mengurutkan, mengkonstruksi peristiwa demi peristiwa. Apa yang kemudian tersaji dan muncul sebagai berita, pada dasarnya adalah hasil olahan dan konstruksi wartawan.

Konstruksionis	Wartawan sebagai partisipan yang menjembatani keragaman subyektifitas pelaku sosial
Positifvis	Wartawan sebagai pelapor

Eriyanto, *Analisis Framing; Konstruksi, Ideology dan Politik Media*

*Kelima*, Etika, pilihan moral, dan keberpihakan wartawan adalah bagian yang integral dalam produksi berita. Dalam pandangan positifis berita harus obyektif, untuk menghasilkannya etika dan pilihan moral wartawan harus di tinggalkan karena dianggap mengganggu obyektifitas. Berbeda dengan kaum

wartawan tidak dapat dipisahkan dari proses peliputan dan pelaporan suatu peristiwa. Wartawan bukanlah robot yang meliput apa adanya, apa yang dia lihat. Wartawan disini bukan hanya sebagai pelapor namun juga mengkonstruksi peristiwa dari dirinya sendiri dari realitas yang diamati.

Konstruksionis	Nilai, etika atau keberpihakan wartawan tidak dapat dipisahkan dari proses peliputan dan pelaporan suatu peristiwa.
Positivis	Nilai, etika, opini dan pilihan moral berada diluar proses peliputan.

Eriyanto, *Analisis Framing; Konstruksi, Ideology dan Politik Media*

*Keenam*, Nilai, etika dan pilihan moral peneliti menjadi bagian yang integral dalam penelitian. Begitu etika dan moral masuk dalam sebuah penelitian maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap hasil penelitian. Karena itu bisa jadi obyek penelitian yang sama akan menghasilkan temuan yang berbeda ditangan peneliti yang berbeda.

Konstruksionis	Nilai, etika dan pilihan moral bagian tak terpisahkan dari suatu penelitian
Positivis	Nilai, etika dan pilihan moral harus berada diluar proses penelitian

Eriyanto, *Analisis Framing; Konstruksi, Ideology dan Politik Media*

*Ketujuh*, Khalayak mempunyai penafsiran tersendiri atas berita. Menurut kaum positivis berita itu obyektif, sehingga pesan apa yang ditulis wartawan seharusnya sama dengan yang dibaca dan ditafsirkan oleh pembaca atau komunikan, karena komunikan dianggap pasif. Namun berbeda dengan kaum konstruksionis yang memandang setiap individu akan mempunyai persepsi yang berbeda atas suatu berita. Penafsiran sendiri ini bisa jadi berbeda

yang mempunyai posisi yang berbeda bisa membaca teks dengan cara yang berbeda pula dengan pembaca lain.

Konstruksionis	Khalayak mempunyai penafsiran tersendiri yang bisa jadi berbeda dari pembuat berita
Positivis	Berita diterima sama dengan apa yang dimaksudkan oleh pembuat berita

Eriyanto, *Analisis Framing, Konstruksi, Ideology dan Politik Media*

Dalam pendekatan konstruksionis yang melihat komunikasi sebagai produksi pesan dan pertukaran makna, memandang kegiatan komunikasi sebagai proses yang dinamis. Pendekatan ini memeriksa bagaimana pembentukan pesan dari sisi komunikator, dan dalam sisi penerima ia memeriksa bagaimana konstruksi makna individu ketika menerima pesan. Dalam menyampaikan pesan, setiap individu merangkai perkataan tertentu dalam memberikan gambaran tentang realitas dalam konteks pengalamannya. Hal ini juga menandakan bahwa peran media sebagai penafsir informasi sama pentingnya dengan perannya sebagai penyampai informasi.

### **E.3. Konstruksi Realitas Media**

Media massa mengemas berita untuk disebarkan kepada manusia lain untuk mewujudkan komunikasi sosial, kemudian berita yang disimak muncul dalam benak manusia. Berita yang muncul dalam benak manusia itu bukan suatu peristiwa asli, tapi lebih merupakan sesuatu yang diserap setelah peristiwa itu terjadi. Berita tidak identik dengan fakta peristiwa, melainkan sebuah upaya untuk merekonstruksi fakta dalam kerangka inti peristiwa. Fakta/peristiwa yang ada dalam isi media adalah hasil dari konstruksi realitas. Bagi kaum



konstruksionis, realitas itu bersifat subyektif. Realitas itu hadir, karena dihadirkan oleh konsep subyektif wartawan<sup>9</sup>. Berita pada hakekatnya adalah hasil konstruksi realitas dengan bahasa sebagai perangkat dasar, dan bahasa dapat menentukan relief seperti apa yang akan diciptakan tentang realitas peristiwa. Bahasa tidak semata-mata ibarat kaca tembus pandang, yang mencerminkan realitas sosial yang secara obyektif ada di sana, tetapi juga adalah kekuatan *konstitutif*, yang menciptakan pandangan tertentu tentang realitas. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Alex Sobur:

“Isi media pada hakikatnya adalah hasil konstruksi realitas dengan bahasa sebagai perangkat dasarnya. Sedangkan bahasa bukan saja sebagai alat merepresentasikan realitas, namun juga bisa menentukan relief seperti apa yang akan diciptakan oleh bahasa tentang realitas tersebut. Akibatnya, media masa mempunyai peluang yang sangat besar untuk mempengaruhi makna dan gambar yang dihasilkan dari realitas yang dikonstruksinya”<sup>10</sup>

Sejak perkembangan awal surat kabar sebagai media massa hingga menjadi ilmu pers yang akhirnya menjadi ilmu komunikasi, surat kabar (sebagai media massa) sudah melakukan konstruksinya secara tidak sengaja. Ketika suatu topik atau tema dipilih untuk ditampilkan, media massa tersebut sudah melakukan salah satu kegiatan konstruktivitas. Apa, kapan, dan bagaimana suatu realitas akan ditampilkan dalam suatu media massa, akan tergantung dari bagaimana cara penulis/penyusun mengemasnya. Posisi penulis/penyusun menempati kedudukan yang strategis dalam hal penentuan

<sup>9</sup> Eriyanto, *op. cit*, 2002, hlm 19

<sup>10</sup> Alex Sobur, *Analisis Teks Media Suatu Pengantar Analisis wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, Rosda, 2004, hlm 88

tampilan awal tulisan walaupun nantinya akan ada *gatekeeper* lain yang harus dilalui.

Pada tahap tertentu, awak media akan menjadi *gatekeeper* yang sangat menentukan seperti apa realitas akan ditampilkan, sehingga muncullah apa yang disebut dengan realitas media (yang bisa jadi bukan merupakan realitas yang sebenarnya) yaitu realitas yang dibangun oleh media yang menerbitkannya. Selain peran profesional yang (harus) dimiliki awak media, terdapat faktor-faktor individu yang tidak dapat dipungkiri sangat mempengaruhi *output* kerja mereka dalam media.

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa media massa di dalam menyebarkan berita, sangat sarat dengan berbagai kepentingan-kepentingan yang menyertai keberadaan media massa tersebut. Dan untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan tersebut, maka pengusaha media massa mengkonstruksi isi media massa yang dimilikinya sedemikian rupa. Terkadang para pengusaha media massa melakukan pertarungan wacana (pertarungan antara kepentingan-kepentingan ekstra media seperti politik, ideologi, dan ekonomi ekstramedia) agar kepentingan-kepentingannya tersebut dapat terpenuhi. Mereka mengkonstruksi realita sedemikian rupa, dan menuangkannya dalam berita, atau informasi yang diterima oleh khalayak. Konstruksi realitas sosial itu dapat dilihat dalam judul, angle, head line, gambar, pilihan kata, obyek yang dijadikan berita, nara sumber berita, dan lain-

lain. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Tuchman<sup>11</sup> “Disebabkan sifat dan faktanya bahwa pekerjaan media massa adalah menceritakan peristiwa-peristiwa, maka seluruh isi media adalah realitas yang telah dikonstruksikan (*constructed reality*). Pembuatan berita di media pada dasarnya tidak lebih dari penyusunan realitas-realitas hingga membentuk sebuah “cerita”.

Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Agus Sudibyo:

Dalam mengkonstruksi suatu realitas, wartawan juga cenderung menyertakan pengalaman dan pengetahuannya yang telah mengkristal menjadi skemata interpretasi (*schemata of interpretation*). Dengan skema ini pula wartawan cenderung membatasi atau menyeleksi sumber berita, menafsirkan komentar-komentar sumber berita, serta memberikan porsi yang berbeda terhadap perspektif atau tafsir yang muncul dalam wacana media. Yang lazim terjadi kemudian penonjolan, atau sebaliknya penafian, pemaknaan tertentu terhadap suatu realitas.<sup>12</sup>

Setiap orang yang berhadapan dengan situasi tertentu akan melakukan definisi terhadap situasi tersebut. Definisi dilakukan berdasarkan pada persepsi yang dimiliki personal yang menilai. Pada saat individu membuat definisi, berarti ia melakukan frame terhadap realitas yang dihadapinya. Frame bekerja pada individu dengan memberi makna pada realitas. Frame sering diidentifikasi sebagai cara bercerita (*story line*) yang menghadirkan konstruksi makna spesifik tentang obyek wacana. Menggunakan paradigma Peter D. Moss dalam sambutan pengantar Deddy Mulyana:

Wacana media massa, termasuk surat kabar, merupakan konstruk kultural yang dihasilkan ideologi karena, sebagai produk media massa, berita surat kabar menggunakan kerangka tertentu untuk

---

<sup>11</sup> Tuchman, Gaye, 1980, *Making News, A Study in the Construction of Reality*, dalam Alex Sobur, *Ibid*, hlm 88

<sup>12</sup> Agus Sudibyo, *Orbit Media dan Pembangunan Wacana*, LKIS, 2001, hlm 31

memahami realitas sosial. Kerangka-kerangka tertentu ini bisa digunakan pada waktu pemberian aksentuasi pada realitas. Apakah dengan mempertajam, memperlembut, mengagungkan, melecehkan, membelokkan, atau mengaburkan realitas tertentu.<sup>13</sup>

Konstruksi makna isi media tidak hanya dipengaruhi faktor personal yang ada didalamnya, tetapi ada lagi faktor lainnya yaitu organisasi dan rutinitas media. Makna pemahaman yang diperoleh individu muncul dari interaksi sosial. Individu tidak lepas dari pola-pola yang ditetapkan dalam pekerjaan mereka, begitupun dengan pekerja media yang berada dalam organisasi akan terepresentasikan dalam *output* yang dihasilkan pekerja didalamnya. Ketika seorang pekerja media memulai pekerjaan mereka (hal ini rutin dilakukan pekerja media), sejak itu pula mereka mulai merepresentasikan kepentingan organisasi. Wartawan yang meliput suatu peristiwa disuatu tempat tertentu, merepresentasikan kepentingan organisasi mereka dimana keputusan pengambilan peristiwa yang diliput tadi adalah keputusan yang melewati level institusi, begitupun dengan pemilihan tema yang kemudian membangunnya dalam suatu konstruksi makna yang dilakukan kru redaksi editorial surat kabar yang secara tidak langsung juga merepresentasikan kepentingan organisasi dimana tema yang dipilih haruslah yang mendukung kinerja surat kabar mereka.

Bisa dikatakan bahwa media massa sebenarnya tidak lagi menampilkan realitas yang obyektif. Realitas yang ditampilkan telah terkamufase dengan

kepentingan media ideologi, materi, atau yang lainnya. Seperti yang dikatakan

Stuart Hall berikut ini:

..media disini dibandang sebagai instrumen ideologi, melalui mana suatu kelompok menyebarkan pengaruh dan dominasinya kepada kelompok lain. Media bukanlah ranah yang netral dimana berbagai kepentingan dan pemaknaan dari berbagai kelompok akan mendapatkan perlakuan yang sama dan seimbang. Media justru menjadi subjek yang mengkonstruksi realitas berdasarkan penafsiran dan definisinya sendiri untuk disebarakan kepada khalayak. Media berperan dalam mendefinisikan realitas kelompok dan ideologi dominanlah yang biasanya lebih berperan dalam hal ini.<sup>14</sup>

Media massa bukan hanya menampilkan realitas, tetapi juga menciptakan makna atas realitas tersebut. Media massa melakukan konstruksi makna dalam setiap tampilan mediana baik secara sadar atau tidak, dengan maksud tertentu atau tidak. Konstruksi makna dilakukan dari level individu sebagai level terkecil dari proses konstruksi makna media massa, bahkan sampai level tertinggi yang tercampuri oleh kepentingan-kepentingan institusi media massa yang bersangkutan. Bisa dikatakan bahwa media massa tidak terlepas dari konstruksi makna. Seperti pernyataan yang ditulis oleh Jakob Otama:

Media setiap hari menyampaikan pesan berupa liputan kejadian, permasalahan, atau komentar. Semua itu tidak dilakukan begitu saja. Semua itu dilakukan melalui proses pemilihan, proses benturan kesadaran intelektual dengan kejadian. Kejadian atau masalah yang diangkat menjadi isi pesan media bukan ditempatkan begitu saja tanpa konteks. Memang dapat juga ditempatkan begitu saja, namun dampak dan bobot pesannya atau bobot komunikatifnya tidak akan optimal. Untuk itu diperlukan penempatan kejadian menjadi pesan yang kontekstual. Konteks itu ikut dibangun dan dibentuk oleh filsafat, visi, kerangka referensi media itu.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Stuart Hall, dikutip dari Agus Sudibyo, *op. cit*, 2001, hlm 55

<sup>15</sup> Jakob Oetama, *Perspektif Pers Indonesia*, LP3ES, 1987, hlm 171

Media melakukan rekonstruksi realitas terhadap realitas yang ada dimana rekonstruksi realitas ini menghasilkan makna, yaitu makna media. Konstruksi media atas realitas sosial menjadi realitas media seringkali dilakukan pekerja media hanya berdasarkan pada asumsi yang dimilikinya. Isi media yang dibuat dengan konstruksi-konstruksi media, sarat dengan berbagai kepentingan yang bisa menyebabkan bias, tendensius, dan menjadi semakin tidak obyektif. Berita-berita pers tidak akan pernah sama persis dengan fakta empiris, sehingga selalu ada perbedaan antara realitas empiris dan realitas media. Dengan demikian, media memiliki dan membangun realitasnya sendiri, yang mungkin berbeda dengan realitas empiris. Wartawan dapat menerapkan standar kebenaran, matriks obyektifitas, serta batasan-batasan tertentu dalam mengolah dan menyuguhkan berita. Dalam merekonstruksi suatu realitas, wartawan juga cenderung menyertakan pengalaman dan pengetahuannya yang telah mengkristal menjadi skema interpretasi (*schemata of interpretation*)<sup>16</sup>.

Istilah konstruksi sosial atas realitas (*social construction of reality*), menjadi terkenal sejak diperkenalkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman melalui bukunya yang berjudul "*The Social Construction of Reality, a Treatise in the Sociological of Knowledge*" (1966). Ia menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, yang mana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif.

---

<sup>16</sup> W.A. Gamson dan A. Modigliani, "*Media Discourse and Public Opinion on Nuclear Power: A Constructionist Approach*", dalam Agus Sudibyo, *op. cit.*, hlm 31

Asal mula konstruksi sosial dari filsafat konstruktivisme.<sup>17</sup> Dalam pandangan konstruksionis, berita itu ibaratnya sebuah drama. Ia bukan menggambarkan realitas, tetapi potret dari arena pertarungan antara berbagai pihak yang berkaitan dengan peristiwa. Secara praktek, tidak ada media yang tanpa kepentingan. Sajian-berkepentingan yang halus dan menarik diikuti dengan penyajian fakta yang benar, bukan dibuat-buat ataupun fitnah adalah sah saja. Sebagian orang beranggapan, pers harus tidak memihak, artinya tidak berkepentingan atau tidak partisipan. Pesan kepada media sudahlah jelas, yaitu masyarakat menuntut pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban menyangkut kualitas pemberitaan, misalnya tidak hanya tentang obyektifitas, berimbang, ketepatan, kejelasan, kejujuran, dan kelengkapan, tetapi juga mengenai nilai-nilai berita yang dikandung suatu peristiwa yang menjadi berita.

Obyektifitas berita banyak ditentukan oleh ketidak berpihakan. Didalam pemberitaan, syarat liput kedua belah pihak harus terpenuhi. Lebih dari itu, isi liputan tersebut harus memadai atau dengan kata lain berimbang. Ketidak berpihakan menurut teori memang dituntut, namun didalam prakteknya sulit diterapkan. Apalagi bila suatu media telah dibebani dengan kepentingan terselubung, maka sikap tidak memihak sangat sulit dilakukan. Ini sering dimanfaatkan oleh media massa partisipan. Nilai berita yang seharusnya diterapkan secara jujur, lepas dari kepentingan tertentu itu, pada akhirnya ditundukan oleh kepentingan tersebut.

---

<sup>17</sup> Bungin, Burhan, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Kencana, 2006, hlm 189

#### **E.4. Surat Kabar Lokal**

Pada dasarnya pengertian surat kabar lokal/dacrah tidak jauh berbeda dengan surat kabar secara umum, yang membedakan surat kabar daerah dengan surat kabar secara umum adalah wilayah atau daerah dimana ia terbit dan cakupan sirkulasinya. Menurut Don Michael F mengatakan: "Surat kabar daerah merupakan surat kabar yang terbit di provinsi dan diedarkan di provinsi tersebut atau beberapa provinsi lain. Surat kabar daerah jarang sekali di salurkan keluar negeri"<sup>18</sup>

Selanjutnya menurut F. Rachmadi mengenai surat kabar daerah adalah: "Surat kabar daerah yaitu pers daerah yang penyebarannya meliputi wilayah propinsi atau daerah tertentu"<sup>19</sup>

Hadirnya Surat Kabar Daerah sangat membantu masyarakat mendapatkan informasi di daerah secara mendalam mengenai perkembangan atau pembangunan yang terjadi. Hal ini karena pers daerah lebih dekat dengan masyarakat dimana ia berada, sehingga lebih tau permasalahan yang ada dan dapat mengkajinya secara mendalam.

Informasi dari Surat Kabar Daerah tidak hanya memuat berita sekitar daerah tapi juga memuat berita nasional dan internasional, ini bertujuan selain memberi informasi kepada masyarakat juga memperkaya wawasan masyarakat daerah.

---

<sup>18</sup> Akhmadiyah Naina, (terjemahan dari Dan Michael Flourmoy) *Analisis isi surat kabar indonesia*, Gajahmada press, 1989, hlm 40

<sup>19</sup> F. Rachmadi, "Surat Kabar Daerah", PT Gramedia Jakarta, 1989, hlm 104



Pers daerah dapat dikatakan merupakan bagian dari masyarakat dimana ia berada karena pers merupakan lembaga kemasyarakatan (*social institutional*). Pers daerah mempunyai tanggungjawab sosial untuk ikut berpartisipasi dalam proses atau kegiatan yang bersifat positif dan konstruktif demi kemajuan daerah. Seperti yang dikatakan Puji Riyanto:

Media daerah hanya akan mampu mengambil peran yang optimal dalam proses demokrasi lokal jika mereka mampu mengembangkan kemampuan kerja jurnalisme yang profesional. Hanya wartawan-wartawan lokal yang bekerja secara profesional yang akan mampu membuat masyarakat daerah terinformasi dengan baik (*well informed*) sehingga mereka dapat berpartisipasi secara efektif dalam proses pengambilan keputusan publik.<sup>20</sup>

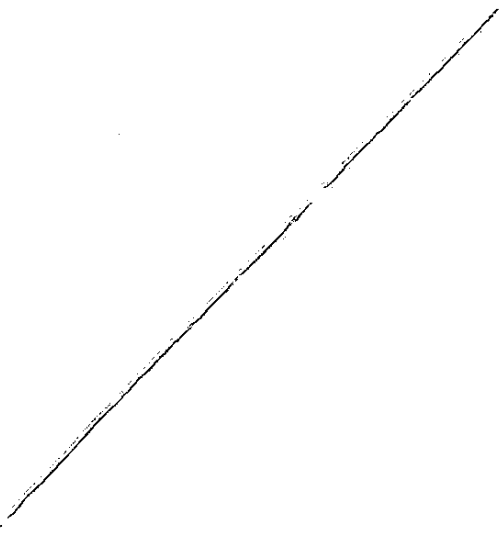
Sesuai dengan GBHN, pers daerah sebagai bagian dari masyarakat daerah dituntut untuk bertanggungjawab atas tercapainya cita-cita dan tujuan pembangunan. Surat Kabar Daerah berkewajiban mendukung kegiatan-kegiatan pembangunan dengan menyesuaikan fungsi-fungsi Surat Kabar seperti memberi informasi, sehingga kontrol sosial maupun mendidik masyarakat.

### **E. 5 Analisis Framing**

Pada umumnya analisis *framing* digunakan untuk menganalisis teks media. Gagasan mengenai *framing*, pertama kali dilontarkan oleh Beterson tahun 1955. *Frame* pada awalnya dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan dan wacana, dan yang menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi

---

<sup>20</sup> Puji Riyanto, Rahayu, Ed., *Menyingkap Profesionalisme Kinerja Surat Kabar di Indonesia*, PKMBP, Dewan Pers, dan Depkominfo, 2006, hlm 235



realitas<sup>21</sup>. Analisis framing dapat dipahami sebagai metode untuk melihat cara bercerita (*story telling*) media atas peristiwa. Cara bercerita itu tergambar pada “cara melihat” terhadap realitas yang dijadikan berita. “Cara melihat” ini berpengaruh pada hasil akhir dari konstruksi realitas.<sup>22</sup>

Secara terminologi ada beberapa pengertian tentang analisis framing, *framing* atau *freme* adalah bingkai yang dibentuk untuk menceritakan realitas yang kemudian dimuat media massa untuk mengarahkan pembaca kepada pemikiran tertentu sesuai dengan yang diinginkan oleh media itu. Menurut Gamson dan Modigliani *frame* adalah cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan obyek suatu wacana.<sup>23</sup>

Ada beberapa definisi mengenai framing yang disampaikan oleh berbagai ahli, misalnya Robert N. Etman yang menyebutkan bahwa:

Framing adalah seleksi dari berbagai aspek realitas yang diterima dan membuat peristiwa itu lebih menonjol dalam suatu teks komunikasi, dalam banyak hal itu berarti menyajikan secara khusus definisi terhadap masalah, interpretasi sebab akibat, evaluasi moral, dan tawaran penyelesaian sebagaimana masalah itu digambarkan.<sup>24</sup>

Realitas yang disajikan secara menonjol atau mencolok mempunyai kemungkinan lebih besar untuk diperhatikan dan mempengaruhi khalayak dalam memahami suatu realitas, sedangkan berita yang mendapat tempat yang kecil akan diabaikan oleh khalayak.

---

<sup>21</sup> Agus Sudibyo, *op. cit*, 2001, hlm 219

<sup>22</sup> Eriyanto, *op. cit*, LKiS, 2002, hlm 10

<sup>23</sup> Alex Sobur, *op. cit*, Rosda, 2004, hlm 162-163

<sup>24</sup> Etman dalam Bima Nugroho, Eriyanto, F Sudiarso, *Politik Media Mengungkap Berita*, ISAI

Framing menurut Gamson and Modigliani adalah:

Pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menseleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan dan hendak di bawa kemana berita tersebut.<sup>25</sup>

Wartawan hidup dan bekerja dalam suatu institusi yang mempunyai pola kerja, kebiasaan, aturan, norma, etika, dan rutinitas tersendiri. Semua elemen proses produksi berita tersebut mempengaruhi bagaimana peristiwa dipahami, secara umum sebagai bagian dari komunitas tertentu ia akan meyerap nilai-nilai kelompok dalam pandangannya secara pribadi.

Framing menurut Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki adalah:

Proses membuat suatu pesan lebih menonjol, menempatkan informasi lebih dari pada yang lain sehingga khalayak lebih tertuju pada pesan tersebut. Atau strategi konstruksi dan memproses berita. Perangkat kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi, menafsirkan peristiwa, dan dihubungkan dengan rutinitas dan konvensi pembentukan berita<sup>26</sup>

Framing disini dipahami sebagai proses dimana seseorang (wartawan) menerjemahkan peristiwa dilingkungan sosialnya kemudian memuatnya dihalaman depan surat kabar dengan kolom yang besar sehingga dianggap penting dan diperhatikan khalayak.

Framing menurut Murray Edelman adalah:

Framing adalah suatu metode kategorisasi yaitu pemakaian perspektif tertentu dengan pemakaian kat-kata yang tertentu pula yang menandakan bagaimana fakta atau realitas dipahami. Kategori membantu manusia memahami realitas yang beragam dan tidak

<sup>25</sup> Gamson and Modigliani dikutip dari *Ibid*, ISAI, 1999, hlm 21

<sup>26</sup> Eriyanto, *op. cit*, 2002, hlm 68

beraturan tersebut menjadi realitas yang mempunyai makna. Dengan kata lain kategorisasi bisa berarti juga suatu penyederhanaan.<sup>27</sup>

Menurut Edelman realitas yang ada diluar sangat banyak, kita memerlukan sesuatu yang mengaturnya secara sistematis agar bisa dipahami, selanjutnya media membingkai realitas itu, apa yang kita ketahui tentang realitas atau tentang dunia tergantung pada bagaimana media mengkonstruksinya. Realitas yang sama bisa menghasilkan konstruksi atau bingkai yang berbeda.

Framing menurut George Junus Aditjondro adalah:

Framing sebagai metode penyajian realitas dimana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus, dengan memberikan sorotan terhadap aspek-aspek tertentu saja, dengan menggunakan istilah-istilah yang punya konotasi tertentu, dan dengan bantuan foto, karikatur, dan alat ilustrasi lainnya<sup>28</sup>.

Meskipun berbeda dalam penekanan dan pengertian, ada titik singgung utama dari definisi framing tersebut. *Framing* adalah pendekatan untuk melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan dikonstruksi oleh media. Proses pementukan dan konstruksi realitas itu, hasil akhirnya adalah adanya bagian tertentu dari realitas yang lebih menonjol dan lebih mudah dikenal. Akibatnya, khalayak lebih mudah mengingat aspek-aspek tertentu yang disajikan secara

Framing menurut Teguh Imawan adalah:

Pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, serta hendak dibawa kemana berita tersebut. Karenanya, berita menjadi manipulatif dan bertujuan mendominasi keberadaan subjek sebagai sesuatu yang *legitimate*, objektif, alamiah, wajar, atau tak terelakkan.<sup>30</sup>

Menurut Eriyanto analisis framing adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Analisis framing juga dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. Kita terkadang sering heran dengan isi media cetak, mengapa kadang ada berita yang mendapatkan sorotan terus-menerus dan ada sebagian kejadian yang justru tidak pernah diangkat menjadi berita oleh media, atau hanya sedikit dibahas di media, menurut Eriyanto perbedaan itu terjadi karena peristiwa itu dipahami dan dikonstruksi secara berbeda oleh media.

Ada dua esensi utama dari framing tersebut. *Pertama*, bagaimana peristiwa dimaknai. Ini berhubungan dengan bagian mana yang diliput dan mana yang tidak diliput. *Kedua*, bagaimana fakta itu ditulis. Aspek ini berhubungan dengan pemakaian kata, kalimat, dan gambar untuk mendukung gagasan. Sehingga dari liputan peristiwa mencakup berita itu akan muncul berbagai isu, dan pada akhirnya akan memunculkan pandangan publik.<sup>31</sup>

Inti proses *framing* adalah tindakan seleksi dan penekanan terhadap aspek realitas. Tindakan seleksi dan penekanan ini dilakukan melalui oprasionalisasi perangkat-perangkat *framing* yang juga dapat didefinisikan

---

<sup>30</sup> Alex Sobur, *loc. cit.* hlm 162

<sup>31</sup> Eriyanto, *op. cit.*, 2002, hlm 10

sebagai perangkat wacana.<sup>32</sup> Berdasarkan bermacam-macam definisi frame di atas, dapat dirumuskan pengertian tentang *framing*. *Framing* dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga elemen isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar dalam kognisi individu dari pada elemen isu yang lain. Asumsi yang digunakan adalah elemen isu yang di tonjolkan mempunyai peluang lebih besar untuk pertimbangan individu (*individual judgement*). Media menyeleksi isu apa yang ingin ia muat pada hari itu, membangun realitas dan memberikan tempat yang lebih besar agar lebih diperhatikan masyarakat dan menganggapnya penting. Framing ditandai dengan menonjolkan aspek tertentu dari realitas. Dalam penulisan sering disebut sebagai fokus. Asumsi mereka adalah jika suatu berita ditonjolkan, masyarakat akan memperhatikan dan menganggap isu itu penting, demikian juga sebaliknya. Berita secara sadar atau tidak diarahkan pada aspek tertentu. Akibatnya, ada aspek lainnya yang tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Pemberitaan suatu peristiwa dari perspektif politik misalnya, mengabaikan aspek lain: ekonomi, sosial, dan sebagainya.

Ditengah "ideologi" profesi jurnalis yang dominan, maka usaha media – dan usaha kelompok yang punya akses ke media– untuk mendefinisikan suatu realitas sosial sudah barang tentu tidak kesemuanya dilakukan secara eksplisit dan vulgar. Usaha untuk mendefinisikan pernyataan Sri Sultan HB X sebagai masalah politik atau masalah budaya tidak selalu dilakukan secara eksplisit dan vulgar, melainkan melalui penyajian yang mengesankan obyektivitas.

---

keseimbangan dan sikap non-partisipan namun toh bisa menggiring khalayak untuk melihat dan mendefinisikan suatu realitas dalam bingkai tertentu, dari sudut pandang tertentu, dengan simbol-simbol bahasa tertentu, atau bahkan menggunakan sistem logika tertentu pula. Upaya media untuk mendefinisikan realitas sosial seperti itulah yang akan mampu diungkap melalui *framing analysis*. Sebuah metode penelitian empirik dan tehnik analisis isi media yang diterapkan dalam menyusun substansi penelitian ini.

## F. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konstruksionis karena dengan menggunakan pendekatan ini peneliti akan melihat bagaimana komunikator yaitu harian *Kedaulatan Rakyat*, *Bernas Jogja*, dan *Radar Jogja* membangun atau mengkonstruksi fakta-fakta tentang pernyataan Sri Sultan HB X, bagaimana gambaran yang ingin ditampilkan harian *Kedaulatan Rakyat*, *Bernas Jogja*, dan *Radar Jogja* kepada publik tentang permasalahan tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori dan objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lain.<sup>33</sup> Paradigma konstruksionis menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana data diperlakukan secara kualitatif, data dalam



penelitian ini adalah berita yang dimuat pada harian *Kedaulatan Rakyat*, *Radar Jogja*, dan *Bernas Jogja* tentang pernyataan Sri Sultan HB X. Analisis yang bisa digunakan untuk mengungkap konstruksi yang dilakukan media salah satunya adalah analisis framing. Analisis framing adalah analisis yang digunakan untuk melihat bagaimana realitas dikonstruksi dan dibentuk oleh media, yang menjadi pusat perhatian adalah pembentukan pesan dari teks terutama melihat bagaimana pesan atau peristiwa dikonstruksi oleh media, dalam hal ini bagaimana wartawan mengkonstruksi peristiwa dan menyajikannya kepada khalayak pembaca, namun pada akhirnya penelitian tidak membandingkan sejauh mana antara konstruksi realitas dengan realitas sebenarnya, tetapi bagaimana konstruksi antar berbagai satar kabar dalam memaknai suatu realitas. Bisa disimpulkan bahwa penelitian ini melakukan analisis isi teks media menggunakan paradigma konstruksionisme dengan metode penelitian kualitatif dan analisis data *framing*.

## 2. Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah berita pernyataan Sri Sultan HB X yang tidak bersedia menjabat sebagai gubernur lagi di halaman depan surat kabar *Kedaulatan Rakyat*, *Radar Jogja*, dan *Bernas Jogja* edisi tanggal 9 sampai 12 April 2007. Berita yang diteliti sebanyak 12 item, dan semua terletak dihalaman pertama. Data tersebut dapat dilihat pada tabel No. 1 berikut. Posisi berita pada halaman pertama menunjukkan nilai berita yang tinggi dan ingin ditonjolkan koran *Kedaulatan Rakyat*, *Radar Jogja*, dan *Bernas Jogja*.

**Tabel No.1** Daftar Surat Kabar dan Judul Berita Yang Menjadi Obyek Penelitian.

	<i>Kedaulatan Rakyat</i>	<i>Radar Jogja</i>	<i>Bernas Jogja</i>
Edisi 9 April 2007	<i>"Pernyataan Sultan HB X Kejutkan Banyak Pihak, Sukses Butuh Kepastian Hukum"</i>	<i>"Rakyat Jangan Paksa Sultan; Ikuti Jejak Ayahnya, Bukti HB X Negarawan"</i>	<i>"Terkait Pernyataan Sri Sultan HB X, Benarkah Hanya Sebuah Basa-Basi Politik?"</i>
Edisi 10 April 2007	<i>"Keputusan Sultan HB X Sikap Seorang Negarawan, Bukti Kraton Lentur dan Adaptif"</i>	<i>"Sultan: Hormati Hak Saya; PA IX Belum Ikuti Jejaknya"</i>	<i>"Sultan HB X Soal Masa Depan PNS DIY; Saya Titipkan Pada Gubernur Baru"</i>
Edisi 11 April 2007	<i>"Perlu Format Keistimewaan yang Tepat; Untuk Dukung Sukses Kepemimpinan di DIY"</i>	<i>"Kelas HB X Nasional; Sofian Beri Dukungan Muju Capres"</i>	<i>"Rektor UGM; Sultan Berpeluang Jadi Presiden"</i>
Edisi 12 April 2007	<i>"Pernyataan Sultan, Akibat RUUK DIY Ngambang; Pusat Harus Segera Bersikap"</i>	<i>"Keistimewaan Sesuai Zaman; Usulkan Gubernur Simbolik dan Eksekutif"</i>	<i>"Sultan GO Nasional, PA IX Pejabat Gubernur?"</i>

Adapun alasan pemilihan koran *Kedaulatan Rakyat* karena harian ini memiliki oplah besar di Indonesia. Selain itu menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Ibnu Hamad, Msi menyebutkan "KR terlibat dengan idealisme Yogyakarta dan politik praktis orang Yogya"<sup>34</sup>

<sup>34</sup> Dikutip dari Ibnu Hamad yang meneliti berita tentang 9 (sembilan) parpol dalam 10 (sepuluh) koran nasional selama kampanye Pemilu 1999, dengan judul *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa, Sebuah Studi Critical Discourse Analysis Terhadap Berita-Berita Politik*, Granit, 2004, hlm 140-146

Sedangkan alasan dipilihnya koran *Radar Jogja* karena harian ini merupakan produk dari harian *Jawa Pos*. Menurut penelitian yang dilakukan Nielsen Media Research pada kuartal ketiga tahun 2006, menunjukkan bahwa *Jawa pos* menempati posisi pertama dalam pengumpulan jumlah pembaca pada segmen *All People*, yakni pembaca koran berusia 10 tahun keatas. Survei tersebut dilakukan di 12 pasar di Indonesia.<sup>35</sup>

Sedangkan alasan memilih koran *Bernas Jogja* karena harian termasuk salah satu koran lokal yang terbit di Yogyakarta dan pernah berafiliasi dengan Partai Nasional Indonesi (PNI) di tahun 1965, sehingga sangat relevan bila peneliti juga ingin melihat bagaimana konstruksi yang dibangun oleh *Bernas Jogja* terhadap berita pernyataan Sri Sultan HB X. Selain itu, pemilihan ketiga surat kabar tersebut karena faktor kemudahan mendapatkannya.

Sedangkan alasan peneliti memilih edisi tanggal 9 sampai 12 April karena *Pertama*, edisi tersebut diterbitkan setelah peristiwa terjadi, dan memuat berita pernyataan Sri Sultan HB X yang tidak bersedia menjabat gubernur lagi. *Kedua*, setelah tanggal 12 isu di media masa semakin berkurang dan telah berganti dengan isu yang baru misalnya isu reshuffle kabinet, berita kedatangan gubernur provinsi NAD Irwandi Yusuf ke Jogja, dan banjir lahar dingin dari puncak gunung Merapi dan lain sebagainya. *Ketiga*, edisi yang terpilih dianggap sudah mewakili konstuksi yang dibangun oleh masing-masing surat kabar tersebut.

<sup>35</sup> Kedaulatan Rakyat, *op. cit*, 2006, hlm 1

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu dengan meminta data dari pusat data dan informasi media yang bersangkutan serta mengkliping pemberitaan pernyataan Sri Sultan HB X di surat kabar *Kedaulatan Rakyat*, *Radar Jogja*, dan *Bernas Jogja* edisi 9 sampai 12 April 2007.

### 4. Teknik Analisis Data

Di dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis framing. Analisis framing sendiri adalah analisis yang memusatkan perhatian pada bagaimana media mengemas dan membingkai berita, sehingga akan dipahami nantinya bukan apakah media memberitakan negatif atau positif, melainkan bagaimana konstruksi media tersebut dalam menulis sebuah berita. Teknik ini juga digunakan untuk menganalisis data yang sudah didapatkan, yang nantinya akan menjelaskan dan mengolah data yang sudah diperoleh sehingga dapat diketahui bagaimana analisis framing *Kedaulatan Rakyat*, *Radar Jogja*, dan *Bernas Jogja* dalam pemberitaan pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Selanjutnya berbagai model dari analisis framing dalam studi ilmu komunikasi dapat dilakukan dengan empat model yang ditawarkan oleh para ahli komunikasi. Diantaranya adalah model-model framing Robert N. Entman, Murray Edelman, Willian A Gamson, dan Zhondang Pan & Gerald M Kosicki.

Salah satu model yang digunakan dalam menganalisis ini telah

Untuk itu, peneliti dalam penelitian ini memilih menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman, karena teknik Entman ini merupakan pisau analisis yang paling cepat dan tepat untuk membongkar konstruksi berita pernyataan Sri Sultan HB X oleh media, dimana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus, serta hendak dibawa kemana berita tersebut. Selain itu teknik tersebut dirasakan cocok dengan latar belakang dan tujuan penelitian ini yang ingin mengetahui bagaimana peristiwa itu dipahami oleh media, bagaimana peristiwa itu disajikan dan dibingkai oleh media. Hal ini sesuai dengan pandangan Entman dalam melihat *framing* berita. Model Entman terutama bergeak pada level bagaimana peristiwa dipahami dan bagaimana pemilihan fakta yang dilakukan oleh media. Dalam konsepsi Entman, *framing* pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan.

Dibandingkan dengan model *framing* dari Murray Edelman yang melihat *framing* sebagai “kategorisasi” yaitu pemakaian perspektif tertentu dengan pemakaian kata-kata tertentu pula yang menandakan bagaimana fakta atau realitas dipahami. Kategori, membantu manusia memahami realitas yang beragam dan tidak beraturan tersebut menjadi realitas yang mempunyai makna.

Contohnya kalau digambarkan dalam tabel berikut ini<sup>36</sup>:

---

<sup>36</sup> Eriyanto, *op. cit*, LKiS, Yogyakarta, 2000, hlm 176

Kami	Mereka
Baik	Buruk
Pahlawan	Penjahat
Stabil	Rusuh

Model ini tidak sesuai dengan obyek penelitian dimana dalam pemberitaan *Kedaulatan Rakyat*, *Radar Jogja* dan *Bernas Jogja* tentang pernyataan Sri Sultan HB X tidak ditemukan adanya penggunaan kategorisasi.

Sementara dalam model yang diperkenalkan oleh William A. Gamson dan Pan & Kosicki tidak cocok diterapkan dalam obyek penelitian ini karena, *Pertama*, model tersebut yang ditekankan adalah penandaan dalam bentuk simbolik, dalam perangkat framingnya Gamson menuntut adanya elemen metafora (*Methapors*) yaitu kalimat perumpamaan atau pengandaian di dalam suatu pemberitaan<sup>37</sup>, begitu juga dengan perangkat framing model Pan & Kosicki, dalam struktur retorisnya—dimana didalam situ wartawan menekankan fakta—terdapat elemen metafora. *Kedua*, setelah peneliti membaca pemberitaan tentang Sultan tidak ditemukan disemua koran kalimat metafora, sehingga kedua model ini batal untuk digunakan karena dikhawatirkan akan terjadi kekosongan elemen tersebut.

Peneliti memutuskan menggunakan framing model Robert N. Entman, karena tidak semua model yang paling lengkap sekalipun (misalnya terdapat elemen retorik) cocok diterapkan dalam obyek penelitian ini. Model yang ditawarkan oleh Robert N. Entman dirasakan sudah cukup kongkrit untuk

<sup>37</sup> Tujuannya untuk menekankan fakta, membuat pesan yang ditampilkan wajar dan beralasan, normal, dan seolah-olah berita itu tampak alami, tidak dibuat-buat, dan terdengar familier di

membedah sajian berita di media massa lokal tersebut. Robert N. Entman adalah salah satu ahli yang meletakkan dasar-dasar bagi analisis framing untuk studi isi media. Oleh Entman konsep *framing* digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas media. *Framing* dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar dari pada isu yang lain<sup>38</sup>. Perbedaan alokasi pemuatan isu dalam berita ini tidak terlepas dari bagaimana proses politik pemaknaan oleh media tersebut. Media massa sebagai tempat untuk diskusi publik dan tempat pertarungan berbagai hal mengakibatkan politik pemaknaan menjadi senjata untuk menjatuhkan atau membangun opini publik tentang suatu peristiwa. Dalam model yang diperkenalkan oleh Entman, tidak merinci secara detail elemen retorik. Entman memusatkan perhatian pada level makrostruktural<sup>39</sup> dan mikrostruktural<sup>40</sup>. Meskipun dalam tingkat analisisnya Entman menunjukkan contoh bagaimana kata, kalimat, dan gambar dapat dianalisis sebagai bagian integral memahami frame, tetapi mereka tidak mengajukan gambaran detail mengenai elemen retorik tersebut.

Menurut Entman, *framing* dalam berita dilakukan dengan empat cara<sup>41</sup>, yakni: *Pertama*, pada identifikasi masalah (*problem identification*), yaitu peristiwa dilihat sebagai apa. Elemen ini merupakan *master frame* / bingkai

---

<sup>38</sup> Eriyanto, *op. cit.*, hlm 186

<sup>39</sup> Level framing ini dapat kita lihat sebagai pembingkai dalam tingkat wacana. Bagaimana peristiwa dipahami oleh media.

<sup>40</sup> Elemen ini memusatkan perhatian pada bagian atau sisi mana dari peristiwa tersebut yang ditonjolkan dan atau sisi mana yang dilupakan/dikecilkan.

<sup>41</sup> Alex Sobur, *op. cit.*, 2004, hlm 172

yang paling utama. Ia menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan. Ketika ada masalah atau peristiwa, bagaimana peristiwa atau isu tersebut dipahami. Peristiwa yang sama dapat dipahami secara berbeda<sup>42</sup>.

*Kedua*, pada identifikasi penyebab masalah (*causal interpretation*), yaitu merupakan elemen framing untuk membingkai siapa yang dianggap penyebab masalah, penyebab disini bisa berarti apa (*what*), tetapi juga bisa berarti siapa (*who*). Bagaimana peristiwa dipahami, tentu saja menentukan apa dan siapa yang dianggap sebagai sumber masalah. Karena itu, masalah yang dipahami secara berbeda, penyebab masalah secara tidak langsung juga akan dipahami secara berbeda pula.<sup>43</sup>

*Ketiga*, pada evaluasi moral (*moral evaluation*)<sup>44</sup>, yaitu penilaian atas penyebab masalah. Ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut, nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan. Gagasan yang dikutip berhubungan dengan sesuatu yang familiar dan dikenal oleh khalayak.

*Keempat*, saran penanggulangan masalah (*treatment recommendation*)<sup>45</sup>, yaitu menawarkan suatu cara penanganan masalah dan kadang kala memprediksi hasilnya. Elemen ini dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan, jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan

---

<sup>42</sup> Rodert N Entman and Andrew Rojecki, dikutip dari Eriyanto, 2002, *op. cit*, LkiS. hlm 190

<sup>43</sup> *Ibid*, 2002, hlm 190

<sup>44</sup> Alex Sobur, *op. cit*, hlm 172

<sup>45</sup> Eriyanto, *op. cit*, hlm 191



masalah. Penyelesaian ini tentu saja sangat tergantung pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah. Apa yang diuraikan oleh Entman tersebut menggambarkan secara lebih jelas apa itu Framing. Peristiwa yang sama bisa dimaknai secara berbeda oleh media. Pemaknaan dan pemahaman yang berbeda itu bisa ditandai dari pemakaian label, kata, kalimat, grafik, dan penekanan tertentu dalam narasi berita. Lebih jelasnya, keempat cara tersebut dapat dilihat pada skema dibawah ini.

Skema 1

SKEMA FRAMING ROBERT N. ENTMAN

